

MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM SD

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL. :	20 DEC 1996
SUMBER / HARGA :	K /
KOLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	1569 / K196 - m2 (2)
KLASIFIKASI :	377.19 SEM m2

Prof. Drs. M. Atar Semi

Panitia penyuluhan tentang Kurikulum SD Muatan Lokal

oleh FKIP Universitas Bung Hatta.

1994.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

MUATAN LOKAL DALAM KURIKULUM SD

1. Pendahuluan

Pemerintah melalui UU Nomor 2 tahun 1989 menetapkan Pendidikan Dasar 9 tahun, dengan meletakkan Sekolah Dasar 6 tahun sebagai penggalan pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 tahun sebagai penggalan kedua. Kebijakan yang dijalankan pemerintah itu merupakan kebijakan yang strategis yang harus dijawab dan dielaborasi dengan benar serta dilaksanakan melalui langkah-langkah operasional yang jelas dan terarah.

Langkah-langkah operasional yang telah dan terus dijalankan pemerintah adalah usaha perbaikan kualifikasi guru dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pembangunan sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hubungan dengan kualifikasi guru, sekarang sudah dijalankan ketentuan bahwa guru SD minimal mempunyai kualifikasi pendidikan DII. Untuk itu telah dilakukan pendidikan penyetaraan. Dalam hubungan dengan kurikulum telah pula dikembangkan kurikulum baru, Kurikulum 1994. Khusus mengenai kurikulum dan misi pendidikan dasar, serta kaitannya dengan muatan lokal akan dibicarakan lebih lanjut dalam makalah ini.

2. Misi dan Kurikulum Pendidikan Dasar

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional RI tahun 1989 menyebutkan, bahwa "Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan menengah". Berdasarkan itu, jelas bahwa pendidikan dasar tidak saja bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah, tetapi lebih dari itu, untuk memperlengkapi mereka untuk kelanjutan belajar dalam kehidupan sebagai orang dewasa, selama masa mereka bekerja dan sesudahnya. Pendidikan dasar hendaknya dapat membuka pintu gerbang ke dunia belajar untuk kepentingan dan kemudahan kehidupan mereka.

Tujuan akhir pendidikan dasar adalah membantu manusia menjadi pribadi yang mampu berdiri sendiri, yang mampu menjalani kehidupan dengan baik dan cerdas. Dengan pendidikan dasar mereka mesti diberikan dasar-dasar yang sesuai dan memadai untuk menghadapi realitas kehidupan. Setelah melalui pendidikan dasar, mereka mampu menggunakan dan memfaedahkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang telah dia miliki untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kenyataan kehidupan yang dia hadapi; bahkan hendaknya mereka mampu secara inteligensia, melanjutkan proses belajar walaupun bukan melalui pendidikan formal.

Singkatnya, pendidikan dasar harus mampu membantu anak

didik menjadi individu dan warga masyarakat yang tahu tentang hak dan kewajibannya, yang mampu mengikuti gelombang kehidupan yang majemuk. Mereka hendaknya mampu mengembangkan filsafat hidupnya sendiri, yang diperluas, dan dimodifikasi, serta diperkaya dengan pengalaman hidup dan timbangan pikiran mereka yang dewasa, cerdas, dan cendikia.

Untuk mencapai tujuan pendidikan dasar seperti itu, tentu harus dikembangkan kurikulum yang sesuai, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 37 UU Sistem Pendidikan Nasional kita, bahwa "Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan." Berdasarkan itu, jelas bahwa pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan, jenis, dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Untuk pendidikan dasar, isi kurikulum tentunya tidak terlepas dari bunyi pasal 39 ayat (3), bahwa "Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:

- (a) Pendidikan Pancasila;
- (b) Pendidikan Agama;
- (c) Pendidikan Kewarganegaraan;
- (d) Bahasa Indonesia;
- (e) Membaca dan Menulis;
- (f) Matematika (termasuk Berhitung);

- (g) Pengantar Sains dan Teknologi;
- (h) Ilmu Bumi;
- (i) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum;
- (j) Kerajinan Tangan dan Kesenian;
- (k) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
- (l) Menggambar, serta
- (m) Bahasa Inggris."

Untuk memahami misi yang seharusnya diemban oleh lembaga pendidikan dasar itu ialah dengan memahami filsafat yang mendasari pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang bertumpu pada pembinaan dan pengembangan aspek *logika, etika, dan estetika*. Apapun jenis mata pelajaran yang dikembangkan di dalam sistem pendidikan dasar akan senantiasa terkait dengan pengembangan ketiga aspek dasar tersebut. Hampir semua negara juga berpedoman kepada ketiga aspek itu, yang membedakannya hanya masalah penekanan terhadap masing-masing aspek. Di Malaysia, misalnya, mencantumkan tiga keterampilan dasar yang harus dikembangkan, yaitu (1) bahasa Kebangsaan, (2) Matematika, dan (3) Agama. Australia, menekankan tiga keterampilan dasar, yaitu (1) bahasa Inggris, (2) Matematika, dan (3) Sosial Budaya. Di Inggris, yang ditekankan adalah (1) penguasaan bahasa Inggris, (2) Matematika, dan (3) Fisika. Di Jepang, yang ditekankan adalah (1) pendidikan Bahasa Jepang, (2) Matematika, dan (3) Ilmu Sosial-budaya.

Bila pemerintah Indonesia mempersyaratkan sejumlah mata pelajaran yang mesti diajarkan di dalam sistem pendidikan dasar, hal itu tentu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan

zaman, khususnya tuntutan pembangunan. Yang perlu di sini adalah masalah penataannya di dalam kurikulum. Perlu dipertimbangkan dengan seksama mengenai porsi dan urutan sajian mata pelajaran dalam kurikulum seperti pada pendidikan awal SD, mata pelajaran mana yang diberikan, pada tingkatan berikutnya yang mana pula serta berapa porsi jam yang memadai untuk masing-masing. Selain itu, di dalam pengembangan kurikulum diperhatikan pula masalah isi dan bobot bahan ajar serta metode mengajar yang sesuai: sesuai dengan tujuan dan sesuai pula dengan tingkat umur dan jenjang kelas. Bila hal ini tidak diatur maka semuanya akan berantakan dan dapat terjadi tumpang-tindih serta pemborosan waktu yang merugikan.

3. Kurikulum Muatan Lokal

Kalau kita berpegang pada prinsip dasar bahwa salah satu tujuan pendidikan yang kita jalankan adalah pembinaan anak didik agar mampu menghadapi kehidupan yang kompleks yang akan ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, maka jelas pendidikan yang dijalankan di semua jenjang harus disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan tuntutan pembangunan. Para lulusan sekolah hendaknya mampu menghadapi kenyataan kehidupan dan memasuki dunia kerja.

Bahwa kondisi masyarakat lingkungan dan kondisi daerah di mana sekolah berada berbeda-beda, maka kurikulum yang sama sekali sentralisasi dapat menyebabkan terbatasnya peluang sekolah pada setiap provinsi dan kabupaten menyesuaikan materi belajar dengan keperluan dan tuntutan lingkungan.

Karena itu, dalam kurikulum sekarang, selain diatur GBPP yang bersifat nasional, diberi peluang pula setiap daerah menyesuaikan dengan keperluan setempat, yang dinamakan muatan lokal. Muatan lokal di sini dimaksudkan adanya fleksibilitas kurikulum dengan melakukan penyesuaian dengan keinginan dan keperluan setempat yang tuntutan dan kondisinya memang berbeda. Dengan begitu, sekolah berjalan secara dinamis mengikuti keperluan dan tuntutan pembangunan yang ada.

Muatan lokal harus ditafsirkan sebagai usaha kreatif sekolah menyesuaikan pendidikan dengan kondisi lingkungan dan memberi penekanan pengajaran kepada apa yang diinginkan berdasarkan keperluan nyata. Sungguhpun demikian, tidak berarti muatan lokal itu dapat dipilih secara bebas dengan memasukkan semua apa yang dirasakan baik dan perlu tanpa memperhatikan hakikat pendidikan dan jenjang persekolahan. Pada pendidikan dasar, misalnya, yang diberikan sebagai muatan lokal adalah hal-hal yang memang dipandang secara logis merupakan dasar pengayaan bagi para peserta didik dalam memasuki masyarakat, dunia kerja, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Adanya peluang sekolah memasukkan muatan lokal tidak terlepas dari pandangan tentang perlunya sekolah secara terbuka menghargai latar-pendidikan yang memungkinkan para siswa terlibat dalam aktivitas yang mempunyai makna pribadi, yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial mereka. Hal ini sesuai dengan filsafat Jean-Jacques Rousseau, yaitu apabila murid diberikan atmosfer yang takterkekang,

mereka akan menempuh jalan perkembangan diri yang kreatif dan intelektual. Selain itu, kebanyakan ahli kurikulum berpendapat bahwa perlu adanya usaha sekolah menanamkan kepada para murid aspek budaya yang akan memungkinkan mereka menjalankan kehidupan yang lebih bermakna dan lebih beradab sehingga mereka kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang memahami nilai-nilai, selain memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Adanya muatan lokal, yang antara lain berisi aspek budaya setempat, merupakan jawaban logis dari keluhan tentang kurikulum sentralisasi yang selama ini berlaku. Dengan kurikulum sentralisasi penuh, sekolah menderita sejenis "isolasi kultural". Hal ini menimbulkan ketidakpuasan tentang hasil pendidikan sekolah. Sungguhpun demikian, bukan berarti memasukkan aspek sosial-budaya lokal ke dalam sekolah lantas tidak menimbulkan masalah. Adanya banyak ahli pendidikan yang berpandangan bahwa perubahan sosial yang berlangsung di sekitar sekolah samasekali tidak relevan bagi proses pendidikan. Tetapi tidak kurang pula banyaknya ahli pendidikan yang menganggap perubahan sosial sebagai sesuatu gejala yang harus dicoba oleh sekolah untuk menghalanginya karena sekolah dilihat sebagai suatu agen konservasi, menghimpun, dan mengoreksinya. Guru di sekolah hendaknya memperkenalkan aspek sosial-budaya yang terdapat di dalam lingkungan sekolah sebagai bahan dan persiapan bagi anak didik menjalani kehidupan secara intelegensia.

Suatu hal yang harus diingat ialah bahwa proses belajar-

mengajar akan menjadi terganggu apabila kepada para peserta didik terlalu banyak diberikan tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam dunia mereka. Yang diberikan sekolah tentulah, yang lebih baik, konsepsi dasar kebudayaan yang mapan, terandal, dan tahan lama. Sekolah sebaiknya jangan berpartisipasi ke dalam perubahan sosial, tetapi sebaliknya sekolah harus berdiri di samping dan memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan yang tegas dan stabil sehingga mereka dapat memahami apa yang terjadi di dalam lingkungannya. Artinya, tujuan pendidikan tidak lagi semata-mata penyesuaian diri, melainkan juga pemupukan kemampuan dan kemauan mengubah masyarakat untuk memperbaiki mutu kehidupan.

Muatan lokal, acuannya tidak saja memperhatikan kebutuhan masa kini dan lingkungan budaya lokal, tetapi juga dapat mengacu kepada persiapan menghadapi masa depan misalnya tentang hal-hal yang berguna dalam menghadapi dunia baru, abad informasi dan komunikasi, serta ekonomi global. Titik berangkat perancangan program pendidikan tidak saja karakteristik peserta didik dan masyarakat sebagai yang diketahui sekarang, melainkan juga sekaligus, karakteristik individu dan masyarakat masa depan yang dikehendaki. Kelangsungan kehidupan bangsa tidak lagi sekedar berarti pelestarian nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, melainkan juga penjemputan hari esok melalui pembentukan nilai-nilai baru. Karena itu, muatan lokal dapat juga diterjemahkan dalam bentuk perluasan kurikulum ideal nasional, misalnya perluasan jam bahasa Inggris, penambahan jam matematika, atau memberikan keterampilan

pilan tertentu seperti keterampilan komputer.

Berdasarkan itu, tugas hakiki pendidikan di sekolah adalah mengasah kemampuan mempertanyakan, yang harus dikembangkan secara seimbang dengan kesediaan menerima nilai-nilai lingkungan, yang bermuara kepada kemandirian yang disertai kemampuan dan kemauan untuk bekerja bersama-sama dengan individu warga masyarakat lainnya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan pandangan hidup bangsa.

5. Tugas dan Peranan Guru

Walaupun setiap daerah dapat memilih dan menetapkan muatan lokal yang dianggap sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik, namun untuk menerjemahkan kurikulum muatan lokal maupun kurikulum ideal nasional, yang bertujuan mengembangkan misi mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi pengalaman belajar peserta didik, peranan guru amat penting, bahkan amat menentukan. Untuk itu, guru harus memiliki wawasan kependidikan yang mantap serta kemampuan profesional yang terandalkan. Wawasan kependidikan memberikan kepada guru acuan dasar di dalam bersikap dan bertindak, dalam arti semua keputusan dan tindakannya, instruksional dan noninstruksional, harus dapat dipertanggungjawabkan secara kependidikan. Kemampuan profesional yang terandalkan berarti dikuasainya pengetahuan dan keterampilan di dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang mendidik.

Setiap guru dituntut kemampuan menerjemahkan secara tepat kurikulum formal menjadi program belajar-mengajar yang

372.19

SEM

m₂

mendidik. Ia harus mampu berpikir strategis di dalam mengambil keputusan situasional, dalam arti, ia mampu meyakinkan kaitan antara tujuan dengan upaya pencapaiannya. Apabila tidak, maka kurikulum ideal maupun kurikulum muatan lokal dapat terpeleset menjadi program belajar yang memberatkan peserta didik. Akhirnya, tujuan luhur kurikulum tersebut tidak kesampaian.

1569 / K / 96 - m₂ (2)